

**PENGARUH PDRB PER KAPITA, PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH  
PENDUDUK PENDUDUK MISKIN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA (IPM) TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2021**

**SKRIPSI**



Oleh :

Nama : Nor Hidayanti

Nomor Mahasiswa : 19313095

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGARUH PDRB PER KAPITA, PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH  
PENDUDUK MISKIN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012-2021**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat tugas akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1  
Program Studi Ilmu Ekonomi,  
Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Nor Hidayanti

Nomor Mahasiswa : 19313095

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiat seperti yang dimaksud dalam buku pedoman skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila ada di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Januari 2023



Nor Hidayanti

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH PDRB PER KAPITA, PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH  
PENDUDUK MISKIN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012-2021**

Nama : Nor Hidayanti

Nomor Mahasiswa : 19313095

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 10 Januari 2023

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Rokhedi Priyo Santoso,,S.E.,MIDec.

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

### BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

#### SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PDRB PER KAPITA, PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK MISKIN,  
DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012-2021

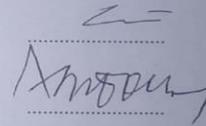
Disusun oleh : NOR HIDAYANTI

Nomor Mahasiswa 19313095

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Rabu, 08 Februari 2023

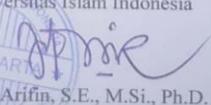
Penguji/Pembimbing Skripsi : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc.

Penguji : Dra. Indah Susantun, M.Si.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



  
Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah 286).

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain) dan berharaplah kepada Tuhanmu.” (Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

“Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.” (Q.S Ali Imran : 146)

“Berani memulai maka berani pula menyelesaikan” (Muhammad Taufik Rahman)

الجامعة الإسلامية  
الاستدراك والتدوير

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kuucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa yaitu nikmat sehat dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan hati, cinta kasih, dan rasa syukur kupersembahkan karya kecil yang masih jauh dari kata sempurna kepada kedua orang tuaku, bapak H. Gazali Rahman dan ibu Hj. Mahrani yang selalu memberikan doa serta dukungan yang tiada hentinya hingga penulis sampai di titik ini untuk mewujudkan mimpiku yang satu persatu tercapai.

Terima kasih untuk kakak tercintaku Muhammad Taufik Rahman dan Fitria Fatma, yang selalu mendoakanku yang terbaik untuk masa depanku dan selalu mendukung keputusan yang diambil serta selalu menjadi inspirasiku.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, atas Ridho dan Rahmat serta BarokahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PDRB PER KAPITA, PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012-2021”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi semua umat manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. .

Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan baik secara moral maupun spiritual sehingga karya kecil ini dapat terselesaikan dengan baik. Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT dengan senantiasa memberikan Ridho, Rahmat, dan BarokahNya serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua bapak H. Gazali Rahman dan ibu Hj. Mahrani yang selalu memberikan doa serta dukungan yang tiada hentinya hingga penulis sampai di titik ini. Sehingga, skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Rokhedi Priyo Santoso,,S.E.,MIDec. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, bantuan, saran dan ilmu pengetahuan lainnya yang sangat bermanfaat bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

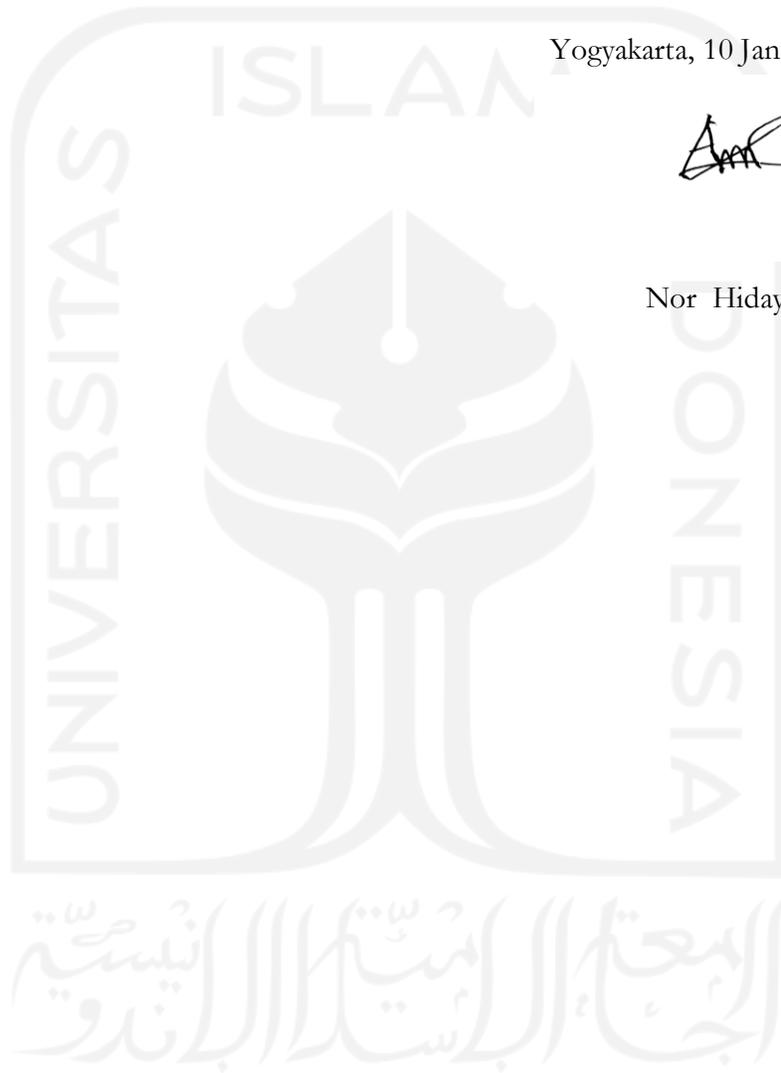
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Staff dan seluruh karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bantuan dan layanan yang sangat baik
9. Keluarga besar, khususnya kakak kandung Muhammad Taufik Rahman dan kakak iparku Fitria Fatma, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk masa depanku, serta selalu memberiku nasihat, dukungan, dan selalu menjadi inspirasiku.
10. Keponakanku Afa Labibah Zakkiya yang selalu memberikan kebahagiaan.
11. Sahabat – sahabatku diperkuliahan Nova, Esti, Emiroh, Eka Wati, Sri Utami, Sri Susanti dan Eka maylinda. Terima kasih atas dukungan dan *sharing – sharing* selama diperkuliahan maupun penulisan skripsi.
12. Sahabatku Utari Muthia Azzahra yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan skripsi Nova, Indah, Azrena, dan Ardelia. Terima kasih untuk *sharing – sharingnya* dalam bimbingan skripsi.
14. Keluarga IE 2019 yang selalu memberikan semangatnya dan berjuang bersama-sama.
15. Teman – teman KKN angkatan 65 unit 224.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya.
17. Terakhir, saya ingin terima kasih untuk diriku sendiri yang telah berjuang hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa karya kecil ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran untuk pengembangan penulisan selanjutnya. Penulis berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat untuk saya sendiri dan khususnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 Januari 2023



Nor Hidayanti



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematik Penulisan .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	10
2.1 Kajian Pustaka .....	10
2.2 Landasan Teori .....	16
2.2.1 Ketimpangan Pendapatan .....	16
2.2.1.1 Indeks Gini dan Kurva Lorenz .....	17

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	19
2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.2.4 Kemiskinan .....	22
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	23
2.3 Hubungan Antar Variabel Bebas dengan Variabel Terikat .....	25
2.3.1 Hubungan PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	25
2.3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan .. .....	25
2.3.3 Hubungan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	26
2.3.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	26
2.4 Kerangka Pemikiran .....	27
2.5 Hipotesis Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	29
3.2 Definisi Variabel Operasional.....	29
3.2.1 Variabel Dependen (Y) .....	29
3.2.2 Variabel Independen (X) .....	30
3.3 Metode Analisis Data .....	31
3.3.1 Model Data Panel Dinamis Linier .....	32
3.4 Uji Spesifikasi Model Data Panel Dinamis Linier .....	35
3.4.1 Uji Sargan (Estat Sargan) .....	35
3.4.2 Uji Arellano-Bond (Estat Abond) .....	35
3.4.3 Uji Ketidakbiasan .....	36
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	37

4.2 Hasil dan Analisis.....	39
4.2.1 Hasil Uji Data Panel Dinamis Linier.....	39
4.3 Analisis Ekonomi.....	43
4.3.1 Analisis pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	43
4.3.2 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	44
4.3.3 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	45
4.3.4 Analisis Pengaruh IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan .....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	47
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Saran .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	50
LAMPIRAN .....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Rasio Gini Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2. 2 Ketimpangan Pendapatan .....	17
Tabel 2. 3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	24
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	37
Tabel 4. 2 Uji Arellano-Bond Dengan Pendekatan Linear DPD .....	40
Tabel 4. 3 Uji Ketidakbiasan Dengan Pendekatan Linear DPD .....	40
Tabel 4. 4 Hasil Estimasi Dengan Pendekatan Linear DPD.....	41



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Lorenz.....	18
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	27



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	55
---------------------------------	----



## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pengaruh PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan selama 10 tahun dari tahun 2012 sampai 2021. Metode yang digunakan adalah analisis data panel dinamis linier dengan *software* stata. Data diambil dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

**Kata Kunci** : *PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Ketimpangan Pendapatan.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu negara memiliki tujuan untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan ini, kemajuan ekonomi suatu negara harus merata. Tingkat kemajuan ekonomi dan kenaikan kesejahteraan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan harus dilaksanakan dengan trilogi pembangunan salah satunya pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut Todaro (2000) pembangunan ekonomi adalah keberlangsungan kehidupan seluruh masyarakat dan sistem sosial (sistem ekonomi dan non-ekonomi) menuju kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, isu-isu seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terus hadir dalam proses pembangunan. Pembangunan ekonomi tidak hanya membahas tentang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, penanggulangan masalah kemiskinan tetapi juga menangani masalah ketimpangan pendapatan antar wilayah dalam suatu negara (Todaro, 2000).

Di beberapa negara berkembang salah satunya di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi fokus utama pembangunan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan dimana manfaat dari pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian penduduk suatu negara. Hal ini juga disebabkan karena pada umumnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi dua masalah besar yaitu ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Di Negara Sedang Berkembang (NSB) perlu menerapkan strategi pertumbuhan dengan distribusi yang berarti bahwa NSB tidak hanya

berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi memperhatikan distribusi pembangunan tersebut agar terciptanya pemerataan (Kuncoro, 1997). Ketimpangan pendapatan masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ketimpangan pendapatan ini menunjukkan bahwa kemakmuran ekonomi Indonesia belum tersebar secara adil. Hal ini sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam mengatasi ketimpangan pendapatan yang ada di setiap wilayah di Indonesia (Sukma, 2021)..

Ketimpangan pendapatan dapat dilihat sebagai perbedaan pendapatan yang diperoleh antara dua wilayah, atau dapat digambarkan sebagai perbedaan pendapatan antara satu orang dengan orang lain dalam satu wilayah atau wilayah yang sama. Ketimpangan yang meningkat dapat diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin melebar, hal ini tercermin dalam rasio gini yang meningkat (Kuncoro, 2010). Salah satu hambatan kemajuan ekonomi adalah ketimpangan pendapatan, dan munculnya ketidaksetaraan sosial dapat menyebabkan inefisiensi pada perekonomian serta perbedaan karakteristik daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah (Farhan & Sugianto, 2022). Ketimpangan pendapatan terjadi ketika adanya perbedaan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin sehingga distribusi pendapatan nasional tidak merata (Todaro & Smith, 2011). Sering kali, pertumbuhan ekonomi tidak merata di setiap daerah, beberapa daerah berkembang dengan cepat sementara yang lain tumbuh dengan lambat, hal ini dapat memicu terjadinya hambatan bagi kemajuan ekonomi.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian Selatan Pulau Kalimantan. Sejak tahun 2020, Kota Banjar Baru menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan Kota Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk 4.122.576 jiwa pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara geografis, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang sangat strategis, karena berada di tengah-tengah Kepulauan Nusantara yang memiliki arus barang dan jasa serta sebagai transit barang dan jasa

(Ariadi & Muzdalifah, 2020). Dengan adanya aktivitas ekonomi ini menimbulkan beberapa permasalahan ekonomi salah satunya ketimpangan pendapatan yang terjadi antara satu orang dengan orang lain dalam wilayah yang sama. Berikut data Rasio Gini di Pulau Kalimantan.

**Tabel 1 1 Rasio Gini Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021**

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>0.378</b>	<b>0.359</b>	<b>0.326</b>	<b>0.353</b>	<b>0.332</b>	<b>0.347</b>	<b>0.344</b>	<b>0.334</b>	<b>0.332</b>	<b>0.330</b>
Kalimantan Barat	0.381	0.370	0.351	0.334	0.341	0.329	0.340	0.330	0.317	0.315
Kalimantan Timur	0.360	0.370	0.360	0.315	0.328	0.333	0.342	0.330	0.335	0.321
Kalimantan Tengah	0.329	0.345	0.352	0.326	0.330	0.343	0.342	0.336	0.329	0.323
Kalimantan Utara	-	-	-	0.314	0.305	0.313	0.304	0.292	0.300	0.272

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut BPS Rasio Gini adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan. Rasio gini memiliki nilai antara 0 sampai 1. Ketimpangan yang lebih tinggi ditunjukkan dengan nilai rasio gini yang mendekati 1. Ketimpangan yang rendah ditunjukkan dengan nilai rasio gini yang kurang dari 0,4 dan ketimpangan sedang ditunjukkan dengan ini rasio gini 0,4 sampai 0,5 dan ketimpangan yang tinggi ditunjukkan dengan rasio gini lebih dari 0,5.

Dapat dilihat dari tabel 1.1 Rasio Gini Provinsi Di Pulau Kalimantan tahun 2012 sampai 2021 menunjukkan adanya peningkatan rasio gini setiap tahunnya. Berdasarkan data di atas, Rasio Gini Provinsi Kalimantan Selatan memiliki ketimpangan pendapatan

yang beragam. Ketimpangan pendapatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 0.378 persen, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.330 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya tingkat pendapatan yang diterima masyarakat serta membuktikan adanya ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan tergolong tinggi dibandingkan dari rata-rata ketimpangan pendapatan di Pulau Kalimantan yang lain.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya yaitu PDRB per kapita yang dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu ukuran penting untuk menghitung besarnya pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi peningkatan PDRB per kapita maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan, sebaliknya ketika PDRB per kapita mengalami penurunan maka ketimpangan pendapatan akan meningkat (Purnamasari et al., 2019). Berdasarkan dari data BPS Provinsi Kalimantan Selatan. PDRB per kapita atas harga konstan seri 2010 di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2012-2021 menunjukkan kenaikan PDRB per kapita dari 26.423.90 juta rupiah tahun 2012 menjadi 32.846.66 juta rupiah tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan berjalan dengan baik dan masyarakat yang ada di dalamnya dapat dikategorikan sejahtera. Dengan adanya peningkatan PDRB per kapita maka pendapatan yang diterima masyarakat semakin baik sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kegiatan ekonomi yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Namun apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan secara cepat maka akan berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan adanya ketidakmerataan pembangunan daerah dan sebagian daerah mengalami pertumbuhan yang lambat (Arif & Wicaksani, 2017). Dari data BPS

menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 5.97 persen menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang semakin baik. Namun tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 1.82 persen akibat dari pandemi Covid 19 dan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 3.48 persen. Hal ini dipengaruhi adanya peningkatan aktivitas ekonomi, seperti peningkatan ekspor batubara, dan penguatan di sektor pertanian, pertambangan dan pariwisata. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2012-2021, kabupaten/kota yang paling tinggi pertumbuhan ekonomi terdapat di Kota Banjarmasin 6.93 persen untuk tahun 2013, sedangkan kabupaten/kota yang paling rendah pertumbuhan ekonomi terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara minus 0.65 persen untuk tahun 2020. Dengan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi ini memicu terjadinya ketimpangan pendapatan di suatu daerah (Fanisa, 2021)

Di Provinsi Kalimantan Selatan masih nyata adanya masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor pendorong ketimpangan pendapatan. Jika tingkat kemiskinan semakin tinggi maka ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi, sebaliknya jika tingkat kemiskinan semakin rendah maka ketimpangan pendapatan akan semakin rendah. Meningkatnya pendapatan masyarakat dapat mengurangi perbedaan pendapatan antara satu orang dengan orang lain sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan (Farhan & Sugianto, 2022). Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan rata-rata jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin 190.694 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin paling rendah tahun 2014 182.876 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mencapai 208.118 ribu jiwa mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya. Dari perhitungan jumlah penduduk miskin berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2012-2021, kabupaten/kota yang paling banyak penduduk miskin terdapat di Kota Banjarmasin dengan jumlah 34.839 ribu jiwa untuk tahun 2021, sedangkan kabupaten/kota yang

paling sedikit jumlah penduduk miskin terdapat di Kabupaten Tapin 5.899 ribu jiwa pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diterima masyarakat masih rendah, terbatasnya kesempatan kerja, keterbatasan masyarakat dalam mengelola sumber daya sekitar, dan rendahnya keterampilan yang dimiliki, maka akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin menimbulkan perbedaan pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain peningkatan jumlah penduduk miskin, Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Ketika IPM mengalami peningkatan maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan, namun sebaliknya ketika IPM mengalami penurunan maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan (Farhan & Sugianto, 2022). Dari hasil data BPS Provinsi Kalimantan Selatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2012-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 66.68 persen tahun 2012 menjadi 71.28 persen pada tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, paling tinggi terdapat di Kota Banjar Baru 79.26 persen untuk tahun 2021, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara 60.12 persen untuk tahun 2012. Dengan adanya peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak dapat mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, agar masyarakat mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang tinggi. Semakin tinggi rata-rata pendapatan yang diterima masyarakat maka akan berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan di suatu daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi,**

## **Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021 ?
2. Bagaimana pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021 ?
3. Bagaimana pengaruh variabel jumlah penduduk miskin terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021 ?
4. Bagaimana pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021.
3. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021.
4. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi beberapa pihak, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk rujukan dan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan untuk penelitian yang akan datang.
3. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, penelitian ini sebagai masukan dalam pertimbangan untuk mengarahkan kebijakan yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat serta program-program dan kebijakan-kebijakan di masa mendatang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang disusun dalam penelitian ini yaitu :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori**

Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu yang terdapat pada kajian pustaka dimana topik pembahasan yang sama pada penelitian ini, landasan teori berisikan penjelasan mengenai teori yang akan digunakan peneliti, menjelaskan hubungan antar variabel pada permasalahan penelitian, membuat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini terdiri dari jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian, penjelasan variabel penelitian, definisi operasional variabel dan metode yang akan digunakan pada penelitian.

#### BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini terdiri dari data yang digunakan dalam penelitian dan memaparkan hasilnya secara keseluruhan (parsial) beserta analisis ekonominya.

#### BAB V : Kesimpulan dan saran

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari hasil dan pembahasan, dan saran dari permasalahan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

**2.1 Kajian Pustaka**

Dalam bab ini, penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan, dengan topik pembahasan yang sama sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa referensi dari penelitian terdahulu :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Farhan dan Sugianto (2022). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Periode 2014-2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di Pulau Jawa periode 2014-2020, sedangkan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa periode 2014-2020.	Lokasi penelitian : Pulau Jawa Periode pengamatan : tahun 2014-2020. Metode penelitian : analisis regresi data panel.	Objek penelitian : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemiskinan.
2	Fanisa (2021). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sumatera Barat Tahun 2016-	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan	Lokasi penelitian : Sumatera Barat Periode pengamatan :	Objek penelitian : pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan

	2020.	pendapatan di Sumatera Barat tahun 2016-2020.	tahun 2016-2020  Metode penelitian : analisis data panel	
3	Rahma (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016, sedangkan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016.	Lokasi penelitian : Pulau Jawa  Periode pengamatan : tahun 2010-2016.  Metode penelitian : analisis regresi data panel.	Objek penelitian : PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4	Sari et al., (2021). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Pendapatan di	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan	Lokasi penelitian : Jambi.  Periode	Objek penelitian : penduduk miskin.

	Provinsi Jambi Tahun 2011-2021.	di Provinsi Jambi tahun 2011-2021, sedangkan variabel penduduk miskin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi tahun 2011-2021.	pengamatan : tahun 2011-2021. Metode penelitian : analisis regresi berganda.	
5	Julian dan Rahmi (2022). Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Tahun 2005-2018.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan	Lokasi penelitian : Pulau Sumatera Periode pengamatan : tahun 2005-2018. Metode penelitian : analisis regresi data panel.	Objek penelitian : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6	Mara dan Rambey (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2011-2016.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2011-2016.	Lokasi penelitian : Indonesia Periode pengamatan : tahun 2011-2016.	Objek penelitian : pertumbuhan ekonomi

			<p>Metode penelitian : Analisis regresi data panel.</p>	
7	<p>Nur Hikmah (2018). Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Surabaya Tahun 2011-2018.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tahun 2011-2018.</p>	<p>Lokasi penelitian : Kota Surabaya</p> <p>Periode pengamatan : tahun 2011-2018.</p> <p>Metode penelitian : analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Objek penelitian : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk miskin</p>
8	<p>Pratama dan Anis (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2013-2020.</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Pulau Sumatera tahun 2013-2020, sedangkan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan inflasi memiliki pengaruh positif dan</p>	<p>Lokasi penelitian : Pulau Sumatera</p> <p>Periode pengamatan : tahun 2013-2020.</p> <p>Metode</p>	<p>Objek penelitian : pertumbuhan ekonomi</p>

		signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Pulau Sumatera tahun 2013-2020.	penelitian : Analisis regresi data panel	
9	Maesza et al., (2022). Pengaruh Anggaran Pertahanan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2000-2019.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pertahanan, pertumbuhan ekonomi dan investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2000-2019.	Lokasi penelitian : Indonesia Periode pengamatan : tahun 2000-2019 Metode penelitian : analisis regresi linier berganda.	Objek penelitian : pertumbuhan ekonomi
10	Ridho dan Wijayanti (2022). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2015-2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan	Lokasi penelitian : Indonesia Periode pengamatan : tahun 2015-2020. Metode penelitian : analisis data	Objek penelitian : pertumbuhan ekonomi

		signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2015-2020.	panel	
11	Alihar (2018). Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016.	Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2012-2016, sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2012-2016 dan variabel total (belanja modal, belanja barang & jasa dan belanja pegawai) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2012-2016.	Lokasi penelitian : Indonesia  Periode pengamatan : tahun 2012-2016.  Metode penelitian : analisis data panel	Objek penelitian : PDRB per kapita.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada perbedaan variabel independen (X) yang penulis gunakan yaitu PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta perbedaan lokasi dan tahun penelitian yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2012-2021 dan metode yang digunakan adalah analisis data panel dinamis linier.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Ketimpangan Pendapatan**

Menurut Tambunan (2018) secara teoritis, ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan antara satu orang atau lebih dalam suatu wilayah/daerah yang sama. Ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh banyak perbedaan seperti perbedaan dalam kesempatan memperoleh pekerjaan, upah atau gaji yang diterima, subsidi yang didapat baik dalam hal akses ke pendanaan, pendidikan, kesehatan, informasi, dan teknologi, pajak yang harus dibayar : jenis pekerjaan yang dilakukan pihak pemerintah/swasta. Disamping itu, praktik-praktik diskriminasi mengenai gender, suku, agama, alumni dan lainnya juga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan merupakan bukti belum meratanya pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu daerah bahkan nasional. Ketimpangan pendapatan adalah distribusi yang tidak seimbang antara pendapatan nasional dengan rumah tangga dalam suatu negara (Todaro & Smith, 2011). Menurut Todaro & Smith (2003) terdapat tiga faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan :

1. Ketimpangan yang ekstrim/tinggi dapat menimbulkan terjadinya inefisiensi ekonomi.
2. Ketimpangan terjadi ketika penduduk berada di atas garis kemiskinan.
3. Ketimpangan yang ekstrim/tinggi dianggap tidak adil.

Menurut Kuznet (1995) ketimpangan distribusi pendapatan mengikuti hipotesis pola U-terbalik, pertama meningkat dan kemudian menurun. Dengan seiring proses pertumbuhan ekonomi, dapat memicu terjadinya perbedaan pendapatan antara

penduduk miskin yang hanya memperoleh pendapatan yang rendah sedangkan penduduk kaya memperoleh pendapatan yang lebih besar. Selain itu, Kuznet (1995) membuat Hipotesis U terbalik dengan menginterpretasikan bahwa awal mula pembangunan dimulai, distribusi pendapatan belum merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan akan merata.

### 2.2.1.1 Indeks Gini dan Kurva Lorenz

Indeks Gini adalah alat ukuran ketimpangan pendapatan penduduk Indonesia (BPS). Adapun koefisien gini berdasarkan kurva Lorenz; koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Koefisien Gini 0 menunjukkan bahwa semua pendapatan didistribusikan secara merata diantara semua unit masyarakat (pemerataan sempurna), sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa semua pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu kelompok saja dari keseluruhan distribusi pendapatan (ketimpangan yang sempurna). Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini. Berikut kriteria menurut Indeks Gini :

**Tabel 2. 2 Ketimpangan Pendapatan**

Nilai	Keterangan
< 0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
> 0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Sumber : Sukma, S. M. (2021)

Indeks Gini dirumuskan secara konvensional sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_i - 1]$$

(2.2.1)

**Keterangan :**

GR : Koefisien Gini

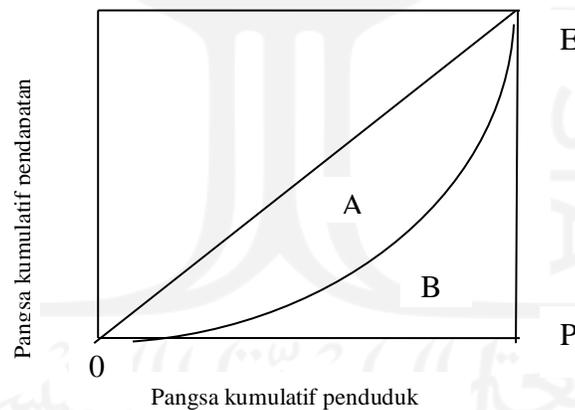
$F_i$  : Jumlah penduduk yang menerima pendapatan kelas ke-i

$Y_i$  : Jumlah kumulatif pendapatan kelas-i

$Y_{i-1}$  : Jumlah kumulatif total pengeluaran kelas ke-i.

Indeks Gini sering kali digambarkan bersamaan dengan kurva Lorenz. Kurva Lorenz yaitu menggambarkan hubungan antara pangsa kumulatif pendapatan dengan pangsa kumulatif penduduk. Menurut Todaro & Smith (2011) kurva Lorenz adalah suatu grafik yang menggambarkan perbedaan distribusi pendapatan dari pemerataan sempurna. Dalam grafik kumulatif penduduk berada di sumbu horizontal menunjukkan urutan penduduk dari yang termiskin sampai yang terkaya, sedangkan kumulatif pendapatan berada pada sumbu vertikal menunjukkan bagian total pendapatan yang diterima oleh masing-masing jumlah penduduk tersebut.

**Gambar 2 1 Kurva Lorenz**



Sumber : Kuncoro (2010)

Nilai Indeks Gini berkisar nol sampai satu. Bila Indeks Gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan merata karena setiap penduduk menerima bagian pendapatan yang sama atau merata. Secara grafik, ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna (garis AE dalam gambar 2.2). Namun, apabila Indeks Gini sama dengan satu menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh sebagian orang saja.

Singkatnya, semakin tinggi nilai indeks gini maka semakin tidak meratanya pendapatan suatu negara, sebaliknya semakin rendah nilai indeks gini maka semakin merata pendapatan yang diterima suatu negara (Kuncoro, 2010).

### **2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu bagian dari indikator ekonomi makro dalam suatu negara. Melalui indikator ini, dapat menunjukkan perekonomian suatu daerah melalui laju pertumbuhan, kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien, serta kemampuan untuk mengendalikan struktur ekonomi. PDRB merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam satu wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun (Pujoalwanto, 2014). PDRB juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Indikator ini dapat dilihat dari kinerja perekonomian dalam suatu wilayah dalam bentuk keberhasilan pemerintah menggerakkan kegiatan perekonomian ke arah yang lebih baik. Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin baik pula potensi daerah tersebut yang tercermin dari nilai bruto seluruh unit produksi yang semakin besar (Prastiwi et al., 2020).

Berdasarkan metode perhitungan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu :

#### 1. Pendekatan produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi pada suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi dalam sektor perekonomian dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha yaitu :

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Pengadaan Listrik dan Gas
- Pengadaan Air

- Konstruksi
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Transportasi dan Pergudangan
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Informasi dan Komunikasi
- Jasa Keuangan
- Real Estate
- Jasa Perusahaan
- Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Lainnya.

## 2. Pendekatan pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan dari suatu wilayah/daerah serta digunakan untuk konsumsi akhir oleh rumah tangga. Dalam pendekatan pengeluaran ini memiliki empat komponen, yaitu :

- Konsumsi yaitu pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen.
- Investasi yaitu pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen.
- Pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran yang dilakukan rumah tangga pemerintah.
- Ekspor dan Impor yaitu pengeluaran yang dilakukan rumah tangga luar negeri.

## 3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang diiringi dengan proses produksi di suatu

daerah dalam jangka waktu satu tahun (BPS). Dalam pendekatan pendapatan/penerimaan terdiri atas empat komponen, yaitu :

- Sewa, yang diterima pemilik faktor produksi alam.
- Upah atau gaji, yang diterima pemilik faktor tenaga kerja.
- Bunga modal, yang diterima pemilik faktor produksi modal.
- Laba (profit), yang diterima pemilik faktor produksi kewirausahaan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. PDRB per kapita digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran suatu negara dan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara. Semakin besar PDRB per kapita, maka semakin makmur sebuah negara. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

(2.2.2)

### 2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Pujolwanto (2014) pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu dengan secara bersamaan mengubah keadaan ekonomi menuju perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Meier dan Baldwin (1960) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Definisi ini menekankan tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang.

Menurut Mankiw (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu konsep dasar ekonomi makro. Peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan makro ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya seperti mengurangi kemiskinan dan juga ketimpangan pendapatan. Data dari pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting

sebagai acuan dalam menentukan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator kemajuan perekonomian dalam suatu daerah/wilayah. Dalam Teori Solow (1956) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang bersumber pada empat faktor utama yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

#### **2.2.4 Kemiskinan**

Menurut Teori Nurkse (1953) kemiskinan berada pada lingkaran setan kemiskinan, disebabkan karena keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kekurangan modal, rendahnya produktivitas yang dimiliki, rendahnya pendapatan, rendahnya tabungan, dan rendahnya investasi (Pujoalwanto, 2014).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dan keterbatasan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan hidupnya (SMERU, 2001). Kemiskinan terjadi ketika individu tidak dapat mencapai standar kehidupan yang minimum maka berdampak pada kurangnya kesejahteraan yang didapat masyarakat (World Bank, 2000).

SMERU (2001) mengartikan kemiskinan dengan melihat dari berbagai dimensi, yaitu sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun kelompok.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
6. Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan.

8. Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental dan
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Kemiskinan mempunyai dua macam ukuran kemiskinan yang paling sering digunakan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif jika pendapatannya berada di bawah tingkat pendapatan di sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat tersebut berada pada lapisan paling bawah. Sedangkan kemiskinan absolut dilihat dari kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan minimal untuk kebutuhan pokok (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan) yang berada di bawah kebutuhan minimum dianggap hidup di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan ukuran kemiskinan absolut untuk melihat kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Orang dikatakan miskin jika tidak dapat memenuhi kebutuhan 2100 kalori/kapita/hari yang dirupiahkan dan dilihat dari pengeluaran rumah tangga (RT). Menurut Kuncoro (2010) jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yang dihitung dari nilai rupiah pada kebutuhan minimum baik makanan maupun non-makanan.

#### **2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu pengukur untuk perbandingan tingkat pendidikan, harapan hidup, melek hidup, dan tingkat hidup di semua negara serta seluruh dunia. IPM digunakan untuk menilai tingkat pembangunan suatu negara apakah suatu negara maju, berkembang atau tidak berkembang, serta untuk mengukur bagaimana dampak kebijakan ekonomi dalam mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan secara rutin diterbitkan dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR) (BPS). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari 3 komponen mendasar :

pengetahuan dan standar hidup layak, umur panjang dan hidup sehat. Menurut Todaro dan Smith (2011) mendefinisikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara dengan menggabungkan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang telah disesuaikan. Menurut BPS Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia (masyarakat/individu).
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mengukur peringkat atau level dalam pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sumber data yang strategi karena selain berfungsi sebagai ukuran kinerja pemerintah tetapi juga IPM digunakan sebagai salah satu bagian dari alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu

**Tabel 2. 3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Klasifikasi	Capaian (IPM)
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

Sumber : Badan Pusat Statistik

## **2.3 Hubungan Antar Variabel Bebas dengan Variabel Terikat**

### **2.3.1 Hubungan PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

PDRB per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. PDRB per kapita menjadi tolak ukur kemakmuran dan tingkat kesejahteraan dalam sebuah negara. PDRB per kapita menjadi salah faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Ketika terjadi peningkatan PDRB per kapita maka dapat menurunkan ketimpangan pendapatan, dan sebaliknya ketika PDRB per kapita mengalami penurunan maka dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Hal ini selaras dengan analisis Kuznet yang menyatakan bahwa PDRB per kapita memiliki relasi dengan ketimpangan pendapatan dalam bentuk hipotesis U terbalik, pada tahap awal pertumbuhan distribusi pendapatan mengalami kondisi yang buruk, namun pada tahap-tahap selanjutnya distribusi pendapatan semakin baik seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

### **2.3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Menurut Tambunan (2018) pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk akan bertambah setiap tahun yang diikuti dengan bertambahnya kebutuhan konsumsi sehari-hari sehingga diperlukan penambahan pendapatan setiap tahunnya, namun pertumbuhan ekonomi jika tidak dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan menyebabkan ketimpangan pendapatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan peningkatan ketimpangan pendapatan dan sebaliknya, penurunan pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan (Mara & Rambey, 2018). Hal ini didukung dari penelitian yang dilakukan Mara & Rambey (2018) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

### **2.2.3 Hubungan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (Kuncoro, 2010). Salah satu penyebab utama ketimpangan pendapatan adalah kemiskinan. Ada dua faktor yang secara langsung berkontribusi terhadap kemiskinan, yaitu kurang atau tidak adanya kesempatan kerja menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan karena tidak bekerja. Kedua, rendahnya upah atau pendapatan riil yang mengakibatkan seorang pekerja memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya atau upah per harinya lebih rendah dari garis kemiskinan yang berlaku. Hal tersebut memicu terjadinya perbedaan pendapatan sehingga dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar satu daerah/wilayah yang lain. Jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang positif terhadap ketimpangan pendapatan. Apabila jumlah penduduk miskin meningkat maka ketimpangan pendapatan akan meningkat, sebaliknya apabila jumlah penduduk miskin mengalami penurunan maka ketimpangan pendapatan akan menurun (Sari et al., 2021). Pengurangan ketimpangan pendapatan akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin (Kuncoro, 2010).

### **2.3.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur taraf dan kualitas penduduk dalam suatu negara, baik secara fisik maupun non fisik. Angka harapan hidup adalah ukuran kualitas fisik, sedangkan angka lama harapan sekolah dan angka melek huruf adalah indikator kualitas non fisik (Julian & Rahmi, 2022). Ketika terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, dikarenakan kualitas dan taraf pembangunan manusia semakin baik. Hal ini didukung dari penelitian yang dilakukan Farhan & Sugianto (2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pada saat terjadi kenaikan IPM, maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan, sebaliknya penurunan IPM akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Peningkatan IPM dapat dilihat dari beberapa

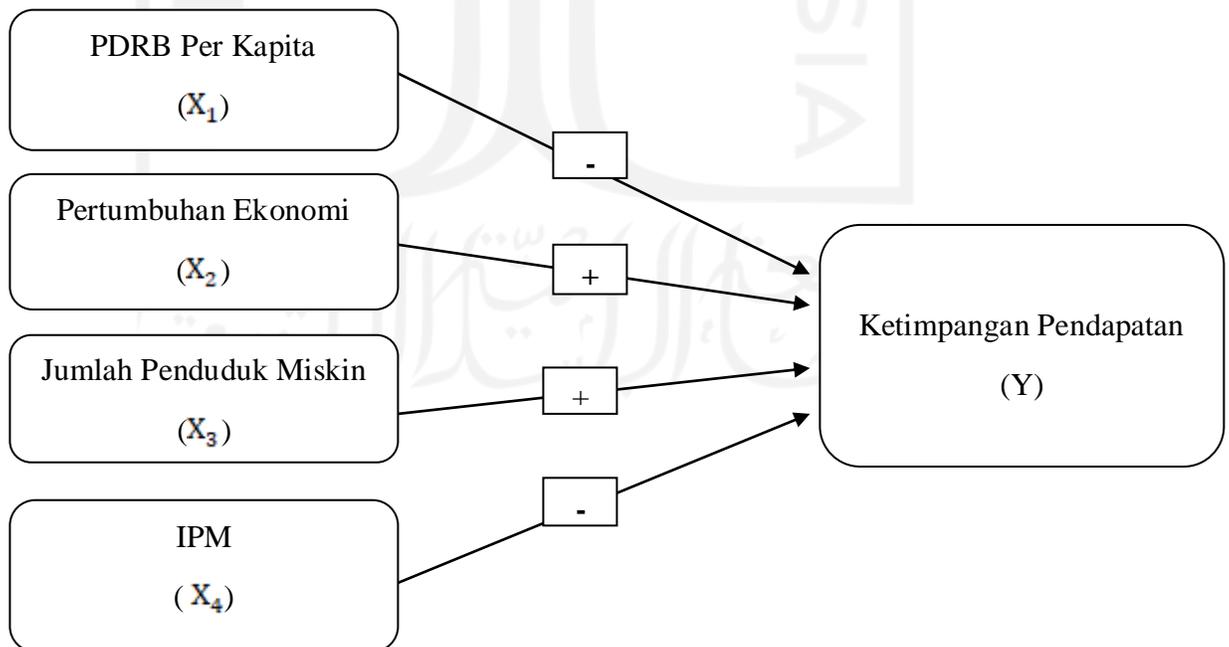
aspek seperti pendapatan riil, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak sehingga dapat mendorong terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik (Farhan & Sugianto, 2022).

Namun di setiap daerah/ wilayah memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berbeda-beda. Produktivitas yang dihasilkan oleh masyarakat dapat digunakan untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saling terkait erat. Pendapatan masyarakat akan dipengaruhi oleh produktivitasnya, begitu pula sebaliknya ketika produktivitas meningkat, ketimpangan pendapatan akan menurun. (Rahma, 2018).

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian pada penelitian terdahulu dan landasan teori maka diperoleh kerangka pemikiran yaitu hubungan antara variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independen).

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil berpengaruh atau tidak berpengaruhnya variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban atau dugaan yang sifatnya sementara terhadap permasalahan dalam penelitian. Berikut hipotesis penelitian :

1.  $H_1$  : diduga PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2.  $H_2$ : diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
3.  $H_3$ : diduga jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
4.  $H_4$ : diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laman website Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan serta data diambil dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama 10 tahun dari tahun 2012-2021. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data rasio gini (persen) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021.
2. Data PDRB per kapita (rupiah) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021.
3. Data jumlah penduduk miskin (jiwa) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021.
4. Data pertumbuhan ekonomi (persen) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021.
5. Data Indeks Pembangunan Manusia (persen) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021.

#### **3.2 Definisi Variabel Operasional**

##### **3.2.1 Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dapat dipengaruhi dari variabel lain. Menurut Widarjono (2015) variabel dependen merupakan variabel yang diestimasi ataupun diprediksi berdasarkan nilai dari variabel lain yaitu variabel independen. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan (Y). Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tanda belum meratanya pendapatan yang diterima. Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang diperoleh antara satu orang dengan orang yang lain dalam satu wilayah/ daerah yang sama. Pada penelitian ini, menggunakan data rasio gini (persen) kabupaten/kota di Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2012-2021 yang didapatkan penulis melalui laman website Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

### 3.2.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang tidak dapat dipengaruhi dari variabel lain. Menurut Widarjono (2015) variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi besarnya nilai variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan 4 variabel independen (bebas). Adapun variabel independen dalam penelitian adalah PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut definisi variabel independen yang digunakan yaitu :

1. PDRB per kapita ( $X_1$ )

PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. PDRB per kapita sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat kesejahteraan pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin makmur negara tersebut. Pada penelitian ini, menggunakan data PDRB per kapita (rupiah) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021 yang didapatkan penulis melalui laman website Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ )

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk, agar peningkatan pendapatan per kapita tercapai (Tambunan, 2018). Pada penelitian ini, menggunakan data pertumbuhan ekonomi (persen) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021 yang didapatkan penulis melalui laman website Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Jumlah penduduk miskin ( $X_3$ )

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, maka semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh adanya garis kemiskinan (Kuncoro, 2013). Pada penelitian ini, menggunakan data jumlah penduduk miskin (jiwa) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021 yang didapatkan penulis melalui laman website Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ( $X_4$ )

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada penelitian ini, menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (persen) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021 yang didapatkan penulis melalui laman website Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

### 3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian adalah analisis data panel dinamis linier. Data panel merupakan data gabungan antara data lintas-waktu (*time series*) dan data lintas-individu (*cross section*). Menurut Widarjono (2015) data panel merupakan penggabungan antara data *time series* dengan data *cross section*. Terdapat dua jenis model data panel yaitu panel statis dan panel dinamis. Pada penelitian ini menggunakan model data panel dinamis linier. Data panel dinamis merupakan metode regresi dengan menambahkan lag pada variabel dependen ( $Y_{t-1}$ ) untuk digunakan sebagai variabel independen (Saryana, 2020).

Selain itu, lag merupakan selang waktu yang mana variabel terikat (Y) dapat merespon variabel bebas (X) dengan selang waktu (Gujarati, 2004). Analisis panel dinamis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan variabel dependen

(terikat) dengan variabel independen (bebas). Adapun variabel dependen dalam penelitian adalah ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel independen dalam penelitian adalah PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian *software* stata.

Berikut beberapa keunggulan dari analisis data panel dinamis yaitu :

1. Model data panel dinamis mampu mengatasi masalah endogenitas mengenai penggunaan lag variabel dependen yang mana pada model data panel statis penggunaan lag variabel dependen dapat mengakibatkan hasil estimasi menjadi bias dan tidak konsisten.
2. Analisis panel dinamis dapat digunakan pada variabel ekonomi yang memiliki sifat dinamis, yang mana nilainya dipengaruhi oleh nilai variabel itu sendiri di masa lalu serta dipengaruhi oleh variabel lain. Oleh karena itu, data panel dinamis cocok digunakan untuk data yang bersifat analisis *dynamic of adjustment* sehingga dapat menghasilkan parameter jeles, berbobot, tidak bias, konsisten dan efisien (Saryana, 2020).
3. Data panel dinamis mampu mengatasi berbagai permasalahan, salah satunya yaitu jika terdapat lag variabel dependen sebagai variabel bebas, maka kemungkinan terdapat korelasi antara variabel dependen dengan residu. Oleh karena itu, maka analisis regresi data panel perlu dilanjutkan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih baik.

### 3.3.1 Model Data Panel Dinamis Linier

Model data panel dinamis linier adalah model yang menyertakan variabel dependen lag sebagai kovariat bersama dengan efek yang tidak teramati, regresi tetap atau acak, dan eksogen. Dengan adanya *panel-level-effect* yang tidak teramati membuat estimator standar tidak konsisten. Kehadiran variabel dependen lag memungkinkan untuk dilakukan pemodelan dengan mekanisme parsial

(keseluruhan). Estimasi data panel dinamis linier biasanya disimbolkan dengan  $xtdpd$ .

Terdapat empat keunggulan dari model panel dinamis linier :

1. Model panel dinamis linier cocok digunakan pada estimator Arellano–Bond (1991) atau Arellano–Bover/ Blundell–Bond (1995, 1998).
2. Model panel dinamis linier memiliki tingkat estimasi yang lebih luas dari  $xtabond$  dan  $xtdpd$ .
3. Model panel dinamis linier dapat menyesuaikan model moving-average yang bergerak pada tingkat rendah.
4. Model panel dinamis linier memuat model yang lebih kompleks dan lebih rumit daripada estimasi  $xtabond$  dan  $xtdpd$ .

#### Model Persamaan Panel Dinamis Linier

$$y_{it} = \sum_{j=1}^p \alpha_j y_{it-j} + X_{it}\beta_1 + w_{it}\beta_2 + v_i + \varepsilon_{it} \quad i = \{1, \dots, N\}; t = \{1, \dots, T_i\}$$

Dimana :

$\alpha_1, \dots, \alpha_p$  adalah parameter  $p$  yang akan diestimasi.

$X_{it}$   $1 \times k_1$  vektor kovariat yang sangat eksogen.

$\beta_1 k_1 \times 1$  vektor parameter yang akan diestimasi.

$w_{it}$   $1 \times k_2$  vektor kovariat yang telah ditentukan.

$\beta_2 k_2 \times 1$  vektor parameter yang akan diestimasi

$v_i$  adalah *panel-level-effect* (yang mungkin berkorelasi dengan  $X_{it}$  atau  $w_{it}$ ), dan  $\varepsilon_{it}$  adalah i.i.d atau berasal dari proses moving-average yang bergerak pada tingkat rendah dengan varians  $\sigma_\varepsilon^2$ .

Model panel dinamis linier dibangun berdasarkan karya Anderson dan Hsiao (1981, 1982) dan Holtz-Eakin, Newey, dan Rosen (1988), Arellano dan Bond (1991) menghasilkan estimator GMM satu langkah dan dua langkah yang menggunakan kondisi momen di mana tingkat *lagged* variabel dependen dan *predetermined* adalah instrumen untuk persamaan diferensial. Blundell dan Bond (1998) menunjukkan bahwa instrumen *lagged-level* dalam estimator Arellano-Bond menjadi lemah karena proses autoregressive menjadi terlalu persisten atau rasio varians dari *panel-level-effects*  $v_i$  terhadap varians dari *idiosyncratic error* menjadi terlalu besar. Sehingga dibangun berdasarkan karya Arellano dan Bover (1995), Blundell dan Bond (1998) yang mengusulkan penaksir sistem yang menggunakan kondisi momen dimana perbedaan *lagged* digunakan sebagai instrumen untuk estimasi GMM pada persamaan diferensial. Kondisi momen tambahan berlaku hanya jika kondisi awal  $E[v_i \Delta y_{i2}] = 0$  berlaku untuk semua  $i$ ; lihat Blundell dan Bond (1998) dan Blundell, Bond, dan Windmeijer (2005).

Estimasi data panel dinamis linier (xtdpd) cocok dengan menggunakan estimator sistem Arellano-Bond atau Arellano-Bover/Blundell-Bond. Parameter yang digunakan lebih banyak memiliki model standar sehingga dapat diestimasi dengan lebih mudah menggunakan penaksir Arellano-Bond yang diterapkan di xtabond atau menggunakan penaksir sistem Arellano-Bover/Blundell-Bond yang diterapkan di xtdpdsys. Estimasi data panel dinamis linier (xtdpd) dapat memuat model yang lebih kompleks dan lebih rumit daripada estimasi xtabond dan xtdpdsys adalah dua alasan umum untuk menggunakan xtdpd daripada xtabond atau xtdpdsys.

Terdapat 2 estimasi GMM melalui VCE yang dikenal sangat bias. Windmeijer (2005) menemukan estimator kuat yang dikoreksi bias untuk VCE dua langkah dari estimator GMM yang dikenal sebagai estimator kuat-WC, yang diimplementasikan dalam xtdpd. Tes Arellano-Bond dari autokorelasi orde kedua dan tes Sargan untuk *overidentification restrictions* yang diturunkan oleh Arellano dan Bond (1991) dihitung dengan xtdpd tetapi masing-masing dilaporkan oleh estat abond dan estat sargan. Selain itu, xtdpd memiliki tingkat estimasi yang lebih luas dari xtabond dan xtdpdsys.

### 3.4 Uji Spesifikasi Model Data Panel Dinamis Linier

#### 3.4.1 Uji Sargan (Estat Sargan)

Uji Sargan merupakan pengujian untuk *overidentifying restriction*. Kondisi dimana jumlah variabel instrumen melebihi jumlah parameter yang diestimasi sehingga perlu dilakukan uji validitas. Uji Sargan digunakan untuk mengetahui validitas penggunaan variabel instrumen yang jumlahnya melebihi jumlah parameter yang diestimasi (kondisi *overidentifying*) (Setyorini, Wijayanti, 2017) Berikut hipotesis dari Uji Sargan :

$H_0$ : kondisi *overidentifying restrictions* dalam estimasi model valid

$H_a$  : kondisi *overidentifying restrictions* dalam estimasi model tidak valid

Mengambil keputusan :

Jika P-value < alfa 5% maka  $H_0$  ditolak. Maka, artinya kondisi *overidentifying restrictions* dalam estimasi model tidak valid.

Jika P-value > alfa 5% maka  $H_0$  tidak ditolak atau  $H_0$  terima. Maka, artinya kondisi *overidentifying restrictions* dalam estimasi model valid.

#### 3.4.2 Uji Arellano-Bond (Estat Abond)

Uji Arellano-Bond digunakan untuk menguji konsistensi estimasi yang didapatkan dari proses GMM. Estimasi yang konsisten artinya bahwa pada *first differences* orde kedua tidak ada autokorelasi antar residual dengan endogennya (Setyorini, Wijayanti, 2017). Berikut Hipotesis uji Arellano-Bond :

$H_0$  : Tidak terdapat autokorelasi pada sisaan *first difference* orde kedua

$H_a$  : Terdapat autokorelasi pada sisaan *first difference* orde kedua

Mengambil keputusan :

Jika P-value > alfa 5% maka,  $H_0$  tidak ditolak, maka artinya tidak terdapat korelasi serial orde kedua sehingga estimasi yang dihasilkan konsisten.

Jika P-value < alfa 5% maka,  $H_0$  ditolak, maka artinya terdapat korelasi serial orde kedua sehingga estimasi yang dihasilkan tidak konsisten.

### 3.4.3 Uji Ketidakbiasan

Uji ketidakbiasan dapat dilakukan melalui estimator dari *pooled least squares* (PLS) yang bersifat *biased upwards* (bias ke atas) dan estimator dari *fixed-effect-model* yang bersifat *biased downward* (bias ke bawah). Estimator yang dikatakan tidak bias, apabila berada di antara keduanya (PLS dan FEM).

## BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laman website Badan Pusat Statistik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan selama 10 tahun yakni dari tahun 2012 sampai 2021. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel independen PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dinamis linier dengan alat pengolahan *software* stata. Selain itu, data yang digunakan meliputi data variabel independen yaitu PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan untuk data variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan.

Deskriptif data pada penelitian ini menjelaskan mengenai nilai mean (rata-rata), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari setiap variabel penelitian yang digunakan untuk Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel**

Variabel	Mean	Max	Min	Std.Dev
Rasio Gini	0.3173538	0.431	0.232	0.0366517
PDRB Per Kapita	31.300.000.00	71.700.000.00	10.600.000.00	17.000.000.00
Pertumbuhan Ekonomi	4.238769	8.04	-2.49	2.307595
Jumlah Penduduk Miskin	14.83291	34839	5899	5424.38
IPM	68.62923	79.26	60.12	4.309105

Sumber : Hasil Pengolahan Stata

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan hasil statistik deskriptif bahwa nilai rata-rata rasio gini di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0.3173538 (persen). Nilai maksimum rasio gini di Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh sebesar 0.431 (persen) sedangkan nilai minimum di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0.232 (persen) dan nilai standar deviasi sebesar 0.0366517 (persen). Sehingga disimpulkan bahwa terjadinya penyebaran data yang merata karena penyimpangan data yang terjadi rendah.

Variabel PDRB per kapita dari 130 data sampel menunjukkan nilai rata-rata PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 31.300.000.00 (rupiah) dan nilai maksimum sebesar 71.700.000.00 (rupiah) serta nilai minimum sebesar 10.600.000.00 (rupiah). Nilai standar deviasi variabel PDRB per kapita sebesar 17.000.000.00 (rupiah) maka disimpulkan bahwa persebaran data merata karena tingkat penyimpangan yang rendah.

Variabel pertumbuhan ekonomi dari 130 data sampel menunjukkan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4.238769 (persen) dan nilai maksimum sebesar 8.04 (persen) serta nilai minimum sebesar -2.49 (persen). Nilai standar deviasi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 2.307595 (persen) maka disimpulkan bahwa persebaran data merata karena tingkat penyimpangan yang rendah.

Variabel jumlah penduduk miskin dari 130 data sampel menunjukkan nilai rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 14.83291 (jiwa) dan nilai maksimum sebesar 34839 (jiwa) serta nilai minimum sebesar 5899 (jiwa). Nilai standar deviasi variabel jumlah penduduk miskin sebesar 5424.38 (jiwa) maka disimpulkan bahwa persebaran data merata karena tingkat penyimpangan yang rendah.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 130 data sampel menunjukkan nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 68.62923 (persen) dan nilai maksimum sebesar 79.26 (persen) serta nilai minimum sebesar 60.12 (persen). Nilai standar deviasi variabel Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) sebesar 4.309105 (persen) maka disimpulkan bahwa persebaran data merata karena tingkat penyimpangan yang rendah.

## 4.2 Hasil dan Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dinamis serta menggunakan metode linear data panel dinamis dengan alat pengolahan *software* stata. Pendekatan kuantitatif adalah pengumpulan data dalam bentuk angka dan pengujian hipotesis sebelumnya dengan menggunakan variabel independen dan variabel dependen.

### 4.2.1 Hasil Uji Data Panel Dinamis Linier

Data panel dinamis linier merupakan model yang menyertakan variabel dependen lag sebagai kovariat bersama dengan efek yang tidak teramati, regresi tetap atau acak, dan eksogen. Dengan adanya *panel-level-effect* yang tidak teramati membuat estimator standar tidak konsisten. Kehadiran variabel dependen lag memungkinkan untuk dilakukan pemodelan dengan mekanisme parsial (keseluruhan). Estimasi data panel dinamis linier biasanya disimbolkan dengan *xtdpd*. Terdapat beberapa kebaikan model data panel dinamis linier yang harus dipenuhi yaitu validitas instrumen, konsistensi, dan ketidakkbiasan :

#### 1. Uji Sargan (Estat Sargan)

```
. estat sargan
Sargan test of overidentifying restrictions
H0: overidentifying restrictions are valid
chi2(32) = 42.75733
Prob > chi2 = 0.0969
```

Berdasarkan hasil estimasi uji sargan di atas diperoleh nilai  $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0969$  lebih besar dari alfa 5%. Artinya, gagal menolak  $H_0$ . Sehingga, tidak terdapat korelasi antara error dan nilai *overidentifying restrictions* mendeteksi tidak terdapat masalah dengan validitas instrumen atau kondisi *overidentifying* dalam pendugaan model valid. Sehingga,

dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji sargan terpenuhi yaitu instrumen yang digunakan sudah valid.

## 2. Uji Arellano-Bond (Estat Abond)

Tabel 4. 2 Uji Arellano-Bond Dengan Pendekatan Linear DPD

```
. estat abond
```

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors

Order	z	Prob > z
1	-2.1141	0.0345
2	.37822	0.7053

H0: no autocorrelation

Berdasarkan hasil Uji Arellano-Bond di atas, nilai orde ke 2 Prob > z = 0.7053 lebih besar dari alfa 5% sehingga gagal menolak  $H_0$ . Artinya, tidak terdapat autokorelasi pada sisaan *first difference* orde kedua. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa syarat konsistensi pada uji Arellano-Bond sudah terpenuhi.

## 3. Uji Ketidakbiasan

Tabel 4. 3 Uji Ketidakbiasan Dengan Pendekatan Linear DPD

. estimates table DPD fem pls, star stats(N)

Variable	DPD	fem	pls
PDRB_perca-a	-1.758e-08**	-6.459e-09*	-4.375e-11
econgrowth	-.00146215	-.00086192	.00086588
poverty	7.720e-06	3.337e-06	4.441e-07
HDI	.02003163*	.00649038	.00161473*
Gini			
Li.		.14389496	.37612921***
_cons	-.61597343	-.01862788	.07615912
N	130	117	117

legend: \* p<0.05; \*\* p<0.01; \*\*\* p<0.001

Nilai koefisien FEM > DPD linear < PLS sebesar .14389496 > .00000000 < .37612921 sehingga syarat ketidakbiasan belum terpenuhi.

### Hasil Estimasi Dengan Pendekatan Data Panel Dinamis Linier

Berikut hipotesis yang digunakan :

$H_0$  : Tidak berpengaruh signifikan

$H_a$  : Berpengaruh signifikan

Dengan menggunakan alfa 5%.

Tabel 4. 4 Hasil Estimasi Dengan Pendekatan Linear DPD.

```
. xtddp rasio_gini pdrb_per_kapita pertumbuhan_ekonomi jumlah_penduduk_miskin ipm, dgmiv(rasio_gini) artests(2)
```

```
Dynamic panel-data estimation      Number of obs   =      130
Group variable: kabhkoto           Number of groups =      13
Time variable: tahun
```

```
Obs per group:
      min =      10
      avg =      10
      max =      10
```

```
Number of instruments =      37      Wald chi2(4) =      14.49
Prob > chi2 =      0.0059
```

One-step results

rasio_gini	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
pdrb_per_kapita	-1.76e-08	5.22e-09	-3.37	0.001	-2.78e-08	-7.35e-09
pertumbuhan_ekonomi	-.0014622	.0014071	-1.04	0.299	-.00422	.0012957
jumlah_penduduk_miskin	.0077203	.0042506	1.82	0.069	-.0006107	.0160512
ipm	.0200316	.0071919	2.79	0.005	.0059359	.0341274
_cons	-.6159734	.3493209	-1.76	0.078	-1.30063	.068683

Instruments for differenced equation

GMM-type: L(2/.)\_rasio\_gini

Instruments for level equation

Standard: \_cons

Berdasarkan hasil estimasi data panel dinamis linier diatas didapatkan hasil sebagai berikut:

### 1. Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan uji signifikansi didapatkan hasil dari probabilitas variabel PDRB per kapita sebesar 0.001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0.05$  sehingga menolak  $H_0$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

### 2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan uji signifikansi didapatkan hasil dari probabilitas variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.299. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari nilai  $\alpha = 0.05$  sehingga gagal menolak  $H_0$ . Maka

dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **3. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Berdasarkan uji signifikansi didapatkan hasil dari probabilitas variabel jumlah penduduk miskin sebesar 0.069. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0.1$  sehingga menolak  $H_0$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Berdasarkan uji signifikansi didapatkan hasil dari probabilitas variabel IPM sebesar 0.005. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0.05$  sehingga menolak  $H_0$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

## **4.3 Analisis Ekonomi**

### **4.3.1 Analisis pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Berdasarkan dari penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien  $-1.76e-08$  terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021. Hal ini menunjukkan jika PDRB per kapita meningkat 1 rupiah maka ketimpangan pendapatan akan berkurang sebesar  $1.76e-08$  unit. Kenaikan jumlah PDRB per kapita akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan. PDRB per kapita merupakan tolak ukur kemakmuran dan tingkat kesejahteraan dalam sebuah wilayah/daerah. Semakin tinggi jumlah PDRB per kapita maka semakin menurun tingkat

ketimpangan pendapatan di suatu wilayah/daerah, sebaliknya semakin rendah jumlah PDRB per kapita maka semakin meningkat tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah/daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesis di awal menyatakan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alihar (2018) yang berjudul “Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016”. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2012-2016.

#### **4.3.2 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis di awal menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pola hubungan yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan terjadi ketika peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan ketimpangan pendapatan karena pengawasan distribusi hasil pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan relatif baik dan merata sehingga tidak mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Selain itu, pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam sektor pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dan baik. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan Kuznets, menyimpulkan bahwa korelasi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan sangat kuat, pada awal pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan yang disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan, namun setelah tahapan yang lebih lanjut pemerataan akan semakin tercapai kemudian tingkat ketimpangan pendapatan akan semakin mengalami penurunan. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukma, 2021)

yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019”. Penelitian tersebut disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019.

#### **4.3.3. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Berdasarkan dari penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu bahwa variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien  $7.72e-06$  terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021. Hal ini menunjukkan jika jumlah penduduk miskin meningkat 1 jiwa maka ketimpangan pendapatan akan bertambah sebesar  $7.72e-06$  unit. Kenaikan jumlah penduduk miskin akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis di awal yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu penyebab utama ketimpangan pendapatan adalah kemiskinan. Ada dua faktor yang secara langsung berkontribusi terhadap kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan kerja mengakibatkan seseorang tidak memiliki pendapatan karena tidak bekerja. Kedua, rendahnya upah atau pendapatan riil sehingga mengakibatkan seorang pekerja memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya atau upah per harinya lebih rendah dari garis kemiskinan yang berlaku. Hal tersebut menyebabkan perbedaan pendapatan sehingga mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar satu daerah/wilayah yang lain. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hikmah (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Surabaya Tahun 2011-2018”. Penelitian tersebut simpulkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tahun 2011-2018.

#### **4.3.4 Analisis Pengaruh IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Berdasarkan dari penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien .0200316 terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021. Hal ini menunjukkan jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 1% maka ketimpangan pendapatan akan bertambah sebesar .0200316 unit. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka akan diberangi dengan peningkatan tingkat ketimpangan pendapatan. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas penduduk dan tingkat harapan hidup di suatu wilayah/daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Provinsi Kalimantan Selatan memiliki angka harapan hidup yang relatif tinggi, yang memungkinkannya untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini hanya terjadi di beberapa daerah yang berpendapatan tinggi, seperti di daerah perkotaan yang berkembang pesat dengan tingkat akses pendidikan yang baik dan maju, fasilitas dan layanan kesehatan yang baik, dan berpendapatan tinggi, sedangkan di beberapa daerah pedesaan atau terpencil jauh dari perkotaan, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih sulit, serta pendapatan yang mereka terima masih cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belum tersebar secara merata antar daerah. Kualitas penduduk dapat berdampak pada persebaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak merata di berbagai daerah, dimana daerah yang lebih maju memiliki kualitas penduduk yang lebih baik dan daerah yang kurang berkembang/masih berkembang memiliki kualitas penduduk yang lebih rendah. Sehingga memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2018) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016”. Hasil dari

penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2016”.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis menggunakan metode analisis data panel dinamis linier, yang berkaitan dengan penelitian berjudul “Pengaruh PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021”. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan tahun 2012-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah PDRB per kapita akan mendorong terjadinya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan ketimpangan pendapatan karena pengawasan distribusi hasil pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan relatif baik dan merata, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin akan mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) akan diikuti dengan peningkatan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat meningkatkan PDRB per kapita dengan menggali potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah seperti batubara, kelapa sawit, pohon karet, tambang, dll yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta membangun infrastruktur dan menyediakan pelayanan publik. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat. Maka akan terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan dalam suatu wilayah/daerah, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memastikan bahwa semua kelompok, baik yang kaya maupun yang miskin, dapat merasakan manfaat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memberikan penekanan yang lebih besar untuk membantu orang miskin dengan memastikan lapangan kerja, memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam akses modal usaha serta melindungi pekerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan diperlukan adanya penyalarsan pembangunan dari berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam yang berkualitas. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan tidak meningkatkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu menekan jumlah penduduk miskin dengan berbagai kebijakan yang dapat dilakukan seperti perbaikan program perlindungan sosial (bantuan subsidi yang berfokus pada masyarakat

miskin), peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan memperluas kesempatan kerja yang sesuai dengan spesifikasi kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin sehingga memperoleh pendapatan yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan minimalnya, pada akhirnya akan berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu meningkatkan beberapa indikator yang ada pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan cara mengoptimalkan sarana pendidikan dan keahlian dengan memperluas kesempatan pendidikan, peningkatan akses kesehatan seperti memperbanyak rumah sakit dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan standar hidup yang layak. Hal ini diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mengurangi ketimpangan pendapatan serta mendorong pemerataan di setiap daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Untuk peneliti yang akan datang, diharapkan agar bisa mengembangkan penelitian yang telah dilakukan penulis untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, baik dari segi metode yang digunakan serta menambahkan variabel baru seperti inflasi, pendidikan, dan pengangguran. Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alihar, F. (2018). Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 66(1), 37–39.
- Anderson, T. W., and C. Hsiao (1981). Estimation of dynamic models with error components. *Journal of the American Statistical Association* 76: 598-606.
- Anderson, T. W., and C. Hsiao (1982). Formulation and estimation of dynamic models using panel data. *Journal of Econometrics* 18: 47-82.
- Arellano, M., and O. Bover (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error components models. *Journal of Econometrics* 68: 29-51.
- Arellano, M., and S. Bond (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *Review of Economic Studies* 58; 277-297.
- Ariadi, V. N., & Muzdalifah, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 485. <https://doi.org/10.20527/jiep.v3i2.2550>
- Arif, M., & Wicaksana, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2021. Berita Resmi Statistik Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2021. Berita Resmi Statistik Indonesia.
- Blundell, R., and S. Bond (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics* 87: 115-143.
- Fanisa, A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sumatera Barat*.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Gujarati, Damodar N, (2004). *Basic Econometrics*, Fourth edition, Singapore. McGraw-Hill Inc.

- Holtz-Eakin, D., W. K. Newey, and H. S. Rosen (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. *Econometrica* 56: 1371-1295.
- Julian, H., & Rahmi, N. (2022). Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Bisnis Aceh*, 1(1), 24–32.
- Koncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomika Pembangunan Edisi Pertama* Yogyakarta: STIE YKPN.
- Koncoro, Mudrajad. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan di Edisi Kelima* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Koncoro, Mudrajad. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan di Edisi Kelima* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Kuznets, Simon (1995). Economic Growth and Income Inequality. *American Economic Review*.
- Maesza, P., Saputro, G. E., & Suwarno, P. (2022). Pengaruh Anggaran Pertahanan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2000-2019. *Jurnal Cafeteria*, 3(1), 130–140.
- Mankiw, Gregory (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Ketiga, Salemba Empat Jakarta.
- Mara, O. :, & Rambey, J. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 32–36.
- Meier, Gerald M. & Baldwin, R.E. (1960). *Economic. Development : Theory, History and Policy*, John Wiley.
- Nur Hikmah, A. (2018). *Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Surabaya Tahun 2011-2018*. 1-.
- Prastiwi, D. H., Laut, L. T., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2014-2018. *DINAMIC : Directory Journal of Economic*, 2(1), 33–50.
- Pratama, F., & Anis, A. (2021). Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan. *Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat*, 1(3), 969–976. <http://103.216.87.80/students/index.php/epb/article/view/7724>
- Pujoalwanto, Basuki (2014). *Perekonomian Indonesia : Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Purnamasari, K., Bisnis, J. A., & Sriwijaya, P. N. (2019). *Analisis Regresi Data Panel Pada Kinerja*. 199–208.
- Ragnar Nurkse (1953). Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Cycle of Poverty).
- Rahma, E. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Jawa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–9.
- Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 71–81. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art7>
- Sari, Y., Soleh, A., & Wafiaziza, W. (2021). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 9(2), 169–180. <https://doi.org/10.53978/jd.v9i2.182>
- Saryana. (2020). *Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*.
- Setyorini, Wijayanti, M. (2017). *Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Menggunakan Regresi Data Panel Dinamis*.
- SMERU Research Institute (2001). Paket Informasi Dasar: Penanggulangan kemiskinan. Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI bekerja sama dengan Lembaga Penelitian SMERU.
- Solow, R. (1956). Contribution to The Theory of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*.
- Sukma, S. M. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Tambunan, Tulus (2018). *Perekonomian Indonesia 1965-2018*, Ghalia Indonesia Cet. 1 Februari 2018.
- Todaro, M. P. dan Smith Stephen. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michel P dan Smith, Stephen P (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas* Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michel P dan Smith, Stephen P (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas* Jakarta: Erlangga.
- Todaro, P. M (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh* Jakarta: Erlangga.
- United Nations Development Programme (UNDP). 1990. *Global Human Development*

Report. Human Resources Department.

Widarjono, A. (2015). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. Ekonisia. Yogyakarta.

Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. *Journal of Econometrics* 126: 25-51.

World Bank (2000). *Global Poverty Report*.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Data Penelitian

Tahun	Kabupaten/Kota	Rasio Gini (persen)	PDRB Per Kapita (rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	Jumlah Penduduk Miskin ( jiwa)	IPM (persen)
2012	TANAH LAUT	0.378	25.591.776	6.03	14.104	65.16
2013	TANAH LAUT	0.359	26.547.269	5.49	13.654	66.11
2014	TANAH LAUT	0.239	26.932.685	3.19	14.039	66.50
2015	TANAH LAUT	0.272	27.262.341	2.87	14.790	66.99
2016	TANAH LAUT	0.279	27.719.505	3.25	15.240	67.44
2017	TANAH LAUT	0.259	28.567.044	4.64	15.308	68.00
2018	TANAH LAUT	0.234	29.479.294	4.65	14.870	68.49
2019	TANAH LAUT	0.271	30.126.221	3.72	15.449	69.04
2020	TANAH LAUT	0.250	29.126.221	-1.95	14.787	69.38
2021	TANAH LAUT	0.232	29.678.551	3.47	15.862	69.87
2012	KOTABARU	0.310	42.786.937	6.53	14.104	64.87
2013	KOTABARU	0.332	44.182.340	5.22	13.654	65.41
2014	KOTABARU	0.347	45.395.800	4.66	15.050	65.76
2015	KOTABARU	0.349	46.063.627	3.32	14.720	66.61
2016	KOTABARU	0.327	47.193.538	4.25	14.780	67.10
2017	KOTABARU	0.326	48.737.919	5.02	14.440	67.79
2018	KOTABARU	0.337	50.303.365	4.89	15.167	68.32
2019	KOTABARU	0.335	51.537.620	4.13	15.287	68.95
2020	KOTABARU	0.287	53.148.644	-1.87	14.597	68.86
2021	KOTABARU	0.306	54.288.746	3.21	16.834	69.13
2012	BANJAR	0.333	16.447.117	6.28	15.732	65.04
2013	BANJAR	0.326	16.910.597	4.60	15.287	65.36
2014	BANJAR	0.351	17.474.839	5.08	15.719	65.71
2015	BANJAR	0.320	17.946.878	4.40	18.050	66.39
2016	BANJAR	0.310	19.365.483	4.70	17.360	66.87
2017	BANJAR	0.348	19.077.122	4.66	16.846	67.77
2018	BANJAR	0.327	19.740.873	5.01	15.615	68.32

2019	BANJAR	0.330	20.349.976	4.51	15.914	68.94
2020	BANJAR	0.322	20.746.114	-1.96	15.124	69.18
2021	BANJAR	0.344	21.165.377	3.21	18.067	69.89
2012	BARITO KUALA	0.318	14.477.571	4.88	14.670	61.62
2013	BARITO KUALA	0.333	14.844.976	4.12	14.909	62.12
2014	BARITO KUALA	0.335	15.297.525	4.51	15.318	62.56
2015	BARITO KUALA	0.366	15.877.307	5.26	15.960	63.53
2016	BARITO KUALA	0.310	16.473.281	5.15	15.710	64.33
2017	BARITO KUALA	0.308	17.206.009	5.79	15.643	64.93
2018	BARITO KUALA	0.338	17.879.432	5.21	14.085	65.91
2019	BARITO KUALA	0.285	18.566.217	5.04	14.488	66.24
2020	BARITO KUALA	0.277	18.402.493	-1.06	14.251	66.22
2021	BARITO KUALA	0.284	18.749.289	3.17	16.099	66.64
2012	TAPIN	0.295	26.489.943	6.32	8.717	65.92
2013	TAPIN	0.279	27.600.669	5.75	6.045	66.48
2014	TAPIN	0.260	28.664.501	5.44	6.518	66.99
2015	TAPIN	0.345	29.395.634	4.05	7.010	67.67
2016	TAPIN	0.321	30.428.980	4.97	6.810	68.05
2017	TAPIN	0.331	31.591.025	5.14	7.011	68.70
2018	TAPIN	0.281	32.750.228	5.01	6.979	69.53
2019	TAPIN	0.268	33.730.065	4.24	6.507	70.13
2020	TAPIN	0.274	33.558.458	-1.49	5.899	70.11
2021	TAPIN	0.289	34.283.038	3.41	6.925	70.31
2012	HULU SUNGAI SELATAN	0.295	14.413.916	5.33	15.146	64.03
2013	HULU SUNGAI SELATAN	0.264	15.046.274	5.68	14.836	64.59
2014	HULU SUNGAI SELATAN	0.269	15.714.897	5.79	15.233	65.25
2015	HULU SUNGAI SELATAN	0.312	16.468.860	6.05	14.590	66.31
2016	HULU SUNGAI SELATAN	0.355	17.262.970	6.08	14.420	67.52
2017	HULU SUNGAI SELATAN	0.336	18.107.155	6.12	13.447	67.80
2018	HULU SUNGAI SELATAN	0.317	19.004.804	6.14	12.224	68.41
2019	HULU SUNGAI SELATAN	0.288	19.799.846	5.28	12.636	68.80
2020	HULU SUNGAI SELATAN	0.300	20.395.173	-1.19	12.385	68.85
2021	HULU SUNGAI SELATAN	0.275	21.066.842	4.18	11.466	69.21
2012	HULU SUNGAI TENGAH	0.310	13.279.862	4.85	14.274	64.34
2013	HULU SUNGAI TENGAH	0.301	13.878.425	5.83	14.181	64.63
2014	HULU SUNGAI TENGAH	0.279	14.465.203	5.56	14.557	65.37

2015	HULU SUNGAI TENGAH	0.327	15.163.297	6.12	15.080	66.56
2016	HULU SUNGAI TENGAH	0.272	15.916.230	6.21	16.220	67.07
2017	HULU SUNGAI TENGAH	0.302	16.630.297	5.73	16.169	67.78
2018	HULU SUNGAI TENGAH	0.320	17.300.841	5.16	16.140	68.32
2019	HULU SUNGAI TENGAH	0.288	17.921.686	4.76	16.096	68.80
2020	HULU SUNGAI TENGAH	0.285	18.679.372	-1.01	15.470	68.84
2021	HULU SUNGAI TENGAH	0.331	19.091.526	3.01	16.770	69.05
2012	HULU SUNGAI UTARA	0.293	10.593.638	5.40	15.045	60.12
2013	HULU SUNGAI UTARA	0.259	10.994.648	5.34	15.228	60.77
2014	HULU SUNGAI UTARA	0.266	11.490.940	5.99	15.623	61.32
2015	HULU SUNGAI UTARA	0.359	11.939.011	5.34	15.940	62.49
2016	HULU SUNGAI UTARA	0.318	12.320.083	4.63	15.380	63.38
2017	HULU SUNGAI UTARA	0.309	12.858.213	5.77	15.352	64.21
2018	HULU SUNGAI UTARA	0.325	13.433.475	5.83	14.919	65.06
2019	HULU SUNGAI UTARA	0.327	13.996.737	5.51	15.398	65.49
2020	HULU SUNGAI UTARA	0.319	14.568.533	-0.67	14.718	65.59
2021	HULU SUNGAI UTARA	0.378	14.901.044	3.23	16.186	66.12
2012	TABALONG	0.327	51.051.362	5.33	13.338	67.36
2013	TABALONG	0.332	52.357.512	4.36	14.305	68.08
2014	TABALONG	0.297	53.530.251	4.03	14.709	68.36
2015	TABALONG	0.285	53.947.051	2.41	15.710	69.35
2016	TABALONG	0.316	59.083.897	3.14	15.400	70.07
2017	TABALONG	0.328	55.964.541	3.74	15.003	70.76
2018	TABALONG	0.305	57.220.219	3.78	14.874	71.14
2019	TABALONG	0.306	58.403.311	3.50	15.222	71.78
2020	TABALONG	0.346	57.175.511	-2.49	14.695	72.19
2021	TABALONG	0.288	58.221.402	3.28	16.128	72.60
2012	TANAH BUMBU	0.319	41.212.234	6.29	16.294	66.13
2013	TANAH BUMBU	0.329	41.220.755	3.80	16.039	66.51
2014	TANAH BUMBU	0.294	41.460.386	3.74	16.563	66.94
2015	TANAH BUMBU	0.333	41.458.751	2.94	17.910	67.58
2016	TANAH BUMBU	0.313	41.576.814	3.12	17.480	68.28
2017	TANAH BUMBU	0.295	42.176.711	4.14	17.016	69.12
2018	TANAH BUMBU	0.332	42.863.916	4.14	17.063	70.05
2019	TANAH BUMBU	0.346	43.348.010	3.58	17.348	70.50
2020	TANAH BUMBU	0.300	47.716.890	-1.39	16.832	70.71

2021	TANAH BUMBU	0.281	48.902.016	4.23	18.919	71.00
2012	BALANGAN	0.329	61.046.230	6.69	8.062	63.69
2013	BALANGAN	0.304	64.800.991	8.04	7.383	64.03
2014	BALANGAN	0.247	67.406.914	5.90	7.664	64.44
2015	BALANGAN	0.403	67.027.314	2.41	7.280	65.34
2016	BALANGAN	0.333	68.455.199	2.62	7.090	66.25
2017	BALANGAN	0.411	69.368.963	2.92	7.213	67.25
2018	BALANGAN	0.310	70.430.917	3.13	7.214	67.88
2019	BALANGAN	0.273	71.596.843	3.16	7.266	68.39
2020	BALANGAN	0.298	70.406.727	-2.47	7.064	68.82
2021	BALANGAN	0.277	71.681.960	3.26	8.062	69.11
2012	KOTA BANJARMASIN	0.413	22.534.427	6.18	29.312	73.45
2013	KOTA BANJARMASIN	0.370	23.753.143	6.93	27.777	74.59
2014	KOTA BANJARMASIN	0.325	24.847.363	6.11	28.537	74.94
2015	KOTA BANJARMASIN	0.388	25.926.225	5.79	29.950	75.41
2016	KOTA BANJARMASIN	0.347	27.202.252	6.28	28.750	75.94
2017	KOTA BANJARMASIN	0.333	28.582.244	6.40	28.932	76.46
2018	KOTA BANJARMASIN	0.377	30.055.632	6.38	29.240	76.83
2019	KOTA BANJARMASIN	0.326	31.538.983	6.09	29.648	77.16
2020	KOTA BANJARMASIN	0.342	33.338.113	-1.89	31.307	77.10
2021	KOTA BANJARMASIN	0.350	34.231.930	3.41	34.839	77.57
2012	KOTA BANJAR BARU	0.370	18.338.384	6.54	11.126	76.67
2013	KOTA BANJAR BARU	0.361	18.955.422	6.59	9.997	77.10
2014	KOTA BANJAR BARU	0.365	19.616.821	6.68	9.965	77.30
2015	KOTA BANJAR BARU	0.352	20.356.917	6.91	11.460	77.56
2016	KOTA BANJAR BARU	0.336	21.137.536	6.94	11.060	77.96
2017	KOTA BANJAR BARU	0.365	21.966.025	6.96	11.539	78.32
2018	KOTA BANJAR BARU	0.364	22.821.801	6.90	10.643	78.83
2019	KOTA BANJAR BARU	0.357	23.723.693	6.85	11.221	79.22
2020	KOTA BANJAR BARU	0.381	24.141.168	-1.83	10.745	79.10
2021	KOTA BANJAR BARU	0.361	24.429.716	3.32	11.951	79.26

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan